

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 dikemukakan bahwa “setiap laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan dan kinerja suatu keuangan entitas”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Laporan Keuangan Daerah merupakan “posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang terstruktur dilakukan oleh suatu entitas”. Tujuan laporan keuangan daerah ialah untuk menyampaikan suatu informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang disampaikan pada khalayak atau yang berkepentingan maka hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai aset dan sumber daya yang dimiliki suatu daerah tersebut.

Laporan akuntansi pemerintah daerah memperlihatkan bagaimana kondisi dan entitas serta pelaksanaan keuangan. salah satu orang yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan daerah pengungkapan keuangan daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan semua aset keuangan daerah ketika tiba di pemerintahan daerah. Perincian keuangan berbasis kemampuan yang diperoleh dari pengaplikasian SAP berpusat pada pemberian manfaat bagi yang berkepentingan dengan tujuan guna dapat diperbaiki lagi kedepanya.

Kinerja keuangan daerah merupakan bagian dari tingkat penyelesaian keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah, dengan melalui indikator keuangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang untuk suatu periode tahun anggaran. Kinerja keuangan diperoleh dari pelaporan keuangan daerah. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan

menganalisis rasio keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Analisis rasio keuangan daerah adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan dan realisasi pendapatan yang sebenarnya diterima. Analisis laporan keberhasilan APBD digunakan sebagai alat penilaian atau mengukur efektivitas pemerintah daerah sendiri, karena analisis laporan keberhasilan APBD harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Penggunaan analisis rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan telah banyak digunakan pada badan-badan komersial, sedangkan badan publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas. Jadi secara teoritis tidak ada kesepakatan yang konsisten tentang nama dan aturan pengukuran. Dalam rangka pengelolaan fiskal daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio fiskal terhadap penerimaan belanja daerah” (Mardiasmo, 2002). Beberapa rasio yang digunakan yaitu:

- a) Rasio kemandirian merupakan bagian yang memperlihatkan keberhasilan pemerintah dalam membiayai tanggung jawab pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat serta membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Semakin besar bagian kemandirian keuangan suatu daerah, semakin kecil ketergantungan pada pihak luar dan sebaliknya, dan tingkat efisiensi mendahului pencapaian pendapatan daerah yang direncanakan ditandai sebagai norma daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- b) Rasio Efektivitas sebagai tolak ukur daerah dan memanfaatkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat bermanfaat untuk mengaktualisasikan pendapatan daerah yang diharapkan.
- c) Rasio efisiensi merupakan memperlihatkan perbandingan total belanja yang dikeluarkan guna membentuk pendapatan dan menggunakan realisasi pendapatan yang diperoleh.
- d) Rasio Keserasian menguraikan bagaimana Pemerintah Daerah mengutamakan penyaluran dana dalam belanja operasional dan belanja modal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan koordinator seluruh unit kerja pemerintah kabupaten sebagai pendukung peraturan kepala daerah guna meraih desentralisasi serta mendukung penyelesaian misi. Fungsi sekretaris daerah sebagai perumusan peraturan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan tugas instansi pemerintah daerah, penyusunan program kerja, serta pembagian tugas, dan tanggung jawab.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan (SETDA) sebagai entitas akuntansi merupakan satu SKPD maka hanya melaporkan 5 laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. dalam penggunaannya Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak pernah melakukan analisis terhadap rasio keuangan daerah, karena SETDA hanya berperan sebagai penyusun laporan keuangan dan yang melakukan pemeriksaan dalam laporan keuangan ialah BPK. Maka analisis rasio sangatlah penting bagi Sekretariat Daerah dalam menilai kinerja SETDA dalam mengelola keuangan daerahnya

dikarenakan hal tersebut diharapkan perhitungan analisis rasio dalam penulisan ini dapat membantu Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka topik yang dapat diidentifikasi dalam penulisan tugas akhir ini yaitu ***“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bangkalan”***.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktek Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Praktek Kerja Lapangan adalah Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bangkalan.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Apakah Baik dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah.

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2001:416), “Kinerja ialah evaluasi perilaku manusia di suatu organisasi untuk tercapainya taraf prestasi atau hasil nyata atau positif”. Kinerja keuangan adalah bidang keuangan yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, struktur utang dan hasil investasi, serta keadaan operasional secara keseluruhan.

Manfaat penilaian kinerja keuangan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan berdasarkan aktivitas keuangannya.
- b. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan terhadap penyaluran pendanaan.
- c. Sebagai dasar perencanaan dimasa yang akan datang.
- d. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai dengan tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja merupakan “ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memperlihatkan bagaimana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.

Mahsun, (2006). Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Indikator Masukan

Adalah semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan pengeluaran.

2. Indikator Proses

Dijelaskan dalam hal skala kegiatan, desain dan tingkat pelaksanaan kegiatan.

3. Indikator Keluaran

Sebuah pencapaian dari kegiatan yang telah dilakukan baik berupa fisik maupun nonfisik.

4. Indikator Hasil

Segala hal yang berkaitan dengan pencerminan fungsi dari segala opengeluaran pada kegiatan yang sifatnya jangka menengah.

5. Indikator Manfaat

Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak

Bagian ini merupakan bagian dari akibat yang timbul suatu baik berupa positif maupun negatif.

1.4.2 Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 “Laporan Keuangan Daerah adalah yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan (SETDA) dibidang Akuntansi dan Pelaporan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pembuatan laporan keuangan yang terdiri tujuh (7) laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan (SETDA) menjadi entitas pelaporan, maka melaporkan 7 laporan keuangan tersebut karena telah mencakup semua SKPD yang berada di Kabupaten Bangkalan akan tetapi, dalam pembuatan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan (SETDA) hanya menjadi entitas akuntansi dan 1 SKPD maka hanya melaporkan 5 laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan akuntansi pemerintah daerah memperlihatkan bagaimana kondisi dan entitas serta pelaksanaan keuangan. salah satu orang yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan daerah pengungkapan keuangan daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan semua aset keuangan daerah ketika tiba di pemerintahan daerah. Perincian keuangan berbasis kemampuan yang diperoleh dari pengaplikasian SAP berpusat pada pemberian manfaat bagi yang berkepentingan dengan tujuan guna dapat diperbaiki lagi kedepannya.

Entitas penyelenggara dibagi menjadi 2 yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

1.4.3 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri 2 bagian, yaitu Analisis dan Pelaporan Keuangan. Analisis adalah dekomposisi jelaskan masalah atau masalah dan hubungannya antara bagian yang diperoleh nanti pemahaman keseluruhan.

Meskipun laporan keuangan penyajian posisi dan kinerja keuangan yang terstruktur keuangan entitas.

Analisis laporan keuangan adalah “menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” (Harahap, 2011). Bagi organisasi privat, analisis laporan keuangan daerah pada umumnya mencakup:

- a. Rasio kemandirian merupakan bagian yang memperlihatkan keberhasilan pemerintah dalam membiayai tanggung jawab pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat serta membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan bagi daerah. Semakin besar bagian kemandirian keuangan suatu daerah, semakin kecil ketergantungan pada pihak luar dan sebaliknya, dan tingkat efisiensi mendahului pencapaian pendapatan daerah yang direncanakan ditandai sebagai norma daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Rasio Efektivitas sebagai tolak ukur daerah dan memanfaatkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat bermanfaat untuk mengaktualisasikan pendapatan daerah yang diharapkan.
- c. Rasio efisiensi memperlihatkan perbandingan total belanja yang dikeluarkan guna membentuk pendapatan dan menggunakan realisasi pendapatan yang diperoleh.

- d. Rasio Keserasian menguraikan bagaimana Pemerintah Daerah mengutamakan penyaluran dana dalam belanja operasional dan belanja modal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya terhadap rasio laporan keuangan, dikarenakan hal tersebut diharapkan perhitungan Analisa rasio dalam penulisan ini dapat membantu Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan.

1.4.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Menurut (Halim, 2007) “Rasio Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi menjadi sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah”. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Table 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2002:189)

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirian nya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas sebagai tolak ukur daerah dan memanfaatkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat bermanfaat untuk mengaktualisasikan pendapatan daerah yang diharapkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2012), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

3. Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009:132) "Efisiensi dilakukan menggunakan memakai perbandingan antara output yg dihasilkan terhadap input yang dipergunakan".

Rasio efisiensi merupakan memperlihatkan perbandingan total belanja yang dikeluarkan guna membentuk pendapatan dan menggunakan realisasi pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Table 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria Efisiensi
100% Ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Departemen dalam negeri Fisipol UGM dalam Susanto (2014)

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian mendeskripsikan bagaimana Pemda mengutamakan alokasi dananya di Belanja Operasi serta Belanja modal secara optimal.

1. Rasio Belanja Operasi

“Rasio ini menginformasikan pada pembaca laporan tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi ialah belanja yang fungsinya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sebagai akibatnya sifatnya jangka pendek serta dalam hal eksklusif sifatnya rutin atau berulang. pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%” (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal

“Berdasarkan rasio belanja modal buat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan buat investasi menggunakan bentuk belanja modal di tahun anggaran bersangkutan. Belanja Modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20%” (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Dengan Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar supaya penulis dapat bisa mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. mempraktikkan teori-teori yang telah didapat.
3. Menjadi untuk bekal kerja di dunia usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
4. Memajukan hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan berbagai macam Instansi.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

- a. Manfaat PKL bagi penulis

Menambah informasi, memperluas pengetahuan dan menambah wawasan kerja di Sekretariat Daerah Kantor Kabupaten Bangkalan.

- b. Bagi Universitas Trunojoyo Madura Jurusan Diploma III Akuntansi
Menjadi acuan pembelajaran dan sarana untuk meningkatkan kualitas pengajaran di masa yang akan datang
- c. Bagi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan
Diharapkan dari hasil praktek kerja lapangan ini memberikan kontribusi, dan manfaat bagi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan
- d. Bagi Pembaca
Sebagai topik yang menarik dan kontribusi untuk pelaksanaan prosedur kerja lapangan serupa di masa depan.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek kerja lapangan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, JL Suekarno Hatta No.35, Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada bulan 10 januari 2022 berakhir tanggal 28 februari 2022 pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan dengan kebijakan SETDA. Tema yang diangkat mengenai dengan topik “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan”. Rincian praktik kerja lapang akan di tampilkan sebagai berikut

Table 3. Rincian Rencana Praktek Kerja Lapangan

No	Kegiatan	November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Topik & Tempat PKL																																				
2	Pengajuan Izin Lokasi																																				
3	Arahan dan Pembekalan PKL																																				
4	Penetapan Dosen Pembimbing																																				
5	Pelaksanaan Kegiatan PKL																																				
6	Penyusunan & Penulisan Laporan PKL																																				
7	Konsultasi Dosen Pembimbing																																				
8	Pengumpulan Laporan PKL																																				
9	Presentasi Laporan hasil PKL																																				

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber informasi dalam kajian penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan data sekunder dapat diperoleh melalui catatan-catatan yang berhubungan dengan kasus ini. Berikutnya adalah beberapa jenis sumber informasi ulasan, yaitu:

a. Data primer

Informasi dikirim langsung dari sumber informasi yang telah ditentukan kepada pengumpul informasi. Sumber informasi penting adalah sebagai catatan atau catatan saksi. Informasi tersebut dipertanggungjawabkan oleh pengamat atau anggota yang telah menyaksikan acara tersebut. Data primer dari penelitian ini adalah sebagai informasi yang diperoleh secara langsung dari wawancara atau interview terhadap Kepala Bagian Pelaporan dan Akuntansi Kantor Sekretariat Daerah, situs web Sekretariat Daerah dan laporan keuangan tahunan Sekretariat Daerah Republik Kabupaten Bangkalan.

b. Data sekunder

Informasi yang didapat melalui pihak luar tidak diperoleh secara langsung dari subyek kajian. Misalnya Buku, jurnal literatur.

1.8.1.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

"Cara pada pengumpulan data menggunakan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan baik itu berupa laporan keuangan dan lain-lain sebagainya". Menurut Sugiyono (2013) catatan ini merupakan pergerakan peristiwa masa lalu. Catatan tersebut dapat berupa teks, foto atau laporan seseorang. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan bukti seperti laporan tahunan 2019-2020.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data informasi yang diharapkan dari pemeriksaan ini adalah mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Sekretariat daerah Kabupaten Bangkalan, suatu pertanyaan yang akan diteliti pada pokok bahasan.

1.8.2 Metode Analisis Data

Pada penyusunan tugas akhir ini penulis memakai metode analisis data kuantitatif menggunakan pendekatan analisis deskriptif, berdasarkan penulis metode ini yang sesuai dengan apa yg menjadi tujuan dan penulisan tugas akhir oleh penulis. Metode analisis deskriptif dilakukan menggunakan metode mengumpulkan data, mengolah data lalu menyajikan data observasi menggunakan tujuan pihak lain bisa mudah memperoleh ilustrasi fenomena tersebut secara sistematis yang diteliti dalam bentuk kata-kata serta bahasa.